

RINGKASAN

Azhar Nasution

*** HUBUNGAN GAYA KEPEMIMPINAN DENGAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA DINAS PENDAPATAN PROPINSI SUMATERA UTARA MEDAN ***

Bimbingan Bapak Drs. H. Miftahuddin, MBA sebagai Pembimbing I dan Ibu. Dra. Isnaniah LKS sebagai Pembimbing II

Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Kepemimpinan bukanlah jabatan atau gelar, melainkan sebuah keahlian dari proses panjang perubahan dalam diri seseorang.

Jadi pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Justru sering sekali seorang pimpinan sejati tidak diketahui keberadaannya oleh mereka yang dipimpinnya. Bahkan ketika misi atau tugas terselesaikan, maka seluruh anggota tim akan mengatakan bahwa merekalah yang melakukannya sendiri. Pimpinan sejati adalah seorang pemberi semangat, motivator, inspirator dan maksimixer.

Agar pegawai dapat termotivasi semangat kerjanya dengan cepat maka tipe kepemimpinan juga sangat menentukan. Dimana seorang pimpinan harus mempunyai kemampuan membaca situasi yang dihadapinya secara tepat dan

menyesuaikan tipe kepemimpinannya agar sesuai dengan tuntutan situasi yang dihadapi, meski penyesuaian itu sifatnya sementara.

Pada tanggal 1 September 1975, dikeluarkanlah Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD 3 / 12 / 43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia, maka bersamaan dengan itu Direktorat Pendapatan Daerah dirubah statusnya menjadi Dinas Pendapatan Daerah.

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 31 Maret 1976 No. 143 / II / GBU, dengan persetujuan DPRD. Pembentukan dinas ini ditetapkan dalam peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 4 Tahun 1976.

Kemudian sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 061/2743/S tanggal 22 Nopember 1999 perihal sebutan - sebutan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, maka terhitung sejak tanggal keluarnya surat ini, sebutan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara dirubah namanya menjadi "*Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara*".

Adapun tugas pokok Dinas Pendapatan Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh usaha di bidang pemungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan yang digariskan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerinta Daerah.

2. Mengadakan penelitian dan mengevaluasi tata cara pungutan Pajak Retribusi dan pungutan lainnya, baik pungutan yang diadakan Pemerintah Daerah sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenangnya maupun pungutan Pemerintah Pusat yang telah diarahkan kepada daerah, guna menciptakan atau mencari sistem yang lebih berdaya guna dan berhasil.
3. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah ke dalam kas daerah secara maksimum, lebih sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan Propinsi Sumatera Utara berkewajiban pula melakukan tugas lainnya :

1. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
2. Mengumpulkan, mensistematika dan mengolah data, serta bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok.
3. Membuat rancangan dan program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.
4. Membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran atau pertimbangan tepat pada waktunya kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan.

5. Memberi saran dan pendapat pada Gubernur Kepala Daerah yang bermacam ragam itu.
6. Mengolah kebijaksanaan tentang Pendapatan Daerah yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
7. Menyusun Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah.
8. Mempersiapkan ketentuan pelaksanaan atau kebijakan di bidang Pemungutan Daerah.
9. Membuat rancangan Peraturan Daerah, meneliti pengadaaan Peraturan Daerah Tingkat II atau sehubungan dengan Pungutan daerah.
10. Menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas Pendapatan Propinsi Sumatera Utara.

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka setiap instansi / organisasi harus mempunyai pemimpin dengan kepemimpinan yang khas. Sehubungan dengan hal tersebut adapun yang menjadi permasalahan dalam pokok bahasan tulisan ini adalah: ” **Masalah apa saja yang dihadapi pimpinan dalam pelaksanaan kepemimpinan dan sejauhmana hubungan tipe kepemimpinan dengan motivasi kerja .**”

Tipe kepemimpinan yang dianut pada Dinas Pendapatan Propinsi Sumatera Utara saat ini adalah demokratis. Pegawai dapat mengeluarkan pendapat dan idenya yang berhubungan dengan kemajuan dan pengembangan organisasi. Pemimpin pada Dinas pendapatan Propinsi Sumatera Utara

Daerah Tingkat I Sumatera Utara dirubah namanya menjadi "*Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara*".

2. Dalam rangka pengembangan dan pemekaran organisasi, untuk pelayanan kepada Wajib Pajak, maka Dinas Pendapatan Propinsi Sumatera Utara sampai saat ini telah membentuk 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis di Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya, yaitu :

1. UPT Medan Utara
2. UPT Medan Selatan
3. UPT Binjai
4. UPT Pematang Siantar
5. UPT Kisatan
6. UPT Rahtau Parapat
7. UPT Padang Sidempuan
8. UPT Sidikalang
9. UPT Gunung Sitoli
10. UPT Balige
11. UPT Penyabungan
12. UPT Tebing Tinggi
13. UPT Kaban Jahe
14. UPT Sibolga

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Sumatera Utara, Kepala Sub Dinas dan Kepala Cabang wajib menerapkan prinsip

Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan instansi lain di luar Dinas Pendapatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Gaya kepemimpinan yang diterapkan pada Dinas Pendapatan Propinsi Sumatera Utara adalah tipe kepemimpinan demikratis. dimana bawahan dapat mengeluarkan ide, pendapat dan kritiknya untuk digunakan sebagai bahan menganbil keputusan bersama.
5. Dalam kepemimpinan yang demokratis yang diterapkan, untuk setiap pengambilan keputusan ditempuh dengan:
 - a. Senantiasa menitik beratkan pada partisipasi kelompok.
 - b. Mendengarkan pendapat dan saran serta kritik dari pegawai.
 - c. Menerapkan komunikasi dua arah
6. Dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja, disamping pemberian gaji, pimpinan juga memberikan dorongan dalam bentuk:
 - a. Untuk pegawai yang berprestasi dan berpotensi akan diikut sertakan pada program pendidikan.
 - b. Kemudahan proses kenaikan pangkat.
 - c. Penyediaan alat untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - d. Suasana kerja yang nyaman.

Dari kesimpulan tersebut, kemudian penulis menyusun saran sebagai berikut:

- I. Pemberian motivasi guna peningkatan produktivitas dalam bentuk finansial kepada pegawai supaya ditingkatkan agar mereka lebih semangat bekerja.

2. Disamping secara finansial, penghargaan dalam bentuk tertulis atau pujian kepada pegawai dalam forum tertentu dapat juga dijadikan sebagai pemberi semangat kerja pegawai.
3. Sebaiknya pimpinan terus mempertahankan gaya kepemimpinannya karena telah diterima oleh seluruh pegawai dan telah membuktikan keberhasilannya.

